



KEMAMPUAN BAHASA INDONESIA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KONTEKS PROFESIONALISME BERBAHASA: ANALISIS HASIL UKBI

PROFILING THE INDONESIAN LANGUAGE PROFICIENCY OF CIVIL SERVANTS THROUGH UKBI ASSESSMENT

RAHMAH KURNIAWATY, RINA HARJANTI

BPMP Provinsi DKI Jakarta

Received : Nov 22, 2025

Revised : Nov 27, 2025

Accepted : Des 14, 2025

Abstract. Proficiency in the Indonesian language is a fundamental competency required of civil servants to support professional communication within governmental institutions. This study aims to analyze the proficiency level of civil servants in using Indonesian in a formal context based on the results of the Indonesian Language Proficiency Test (UKBI). This research employed a quantitative descriptive method with 57 participants from the Educational Quality Assurance Agency (BPMP) of DKI Jakarta Province. The data were obtained from official UKBI results and analyzed using descriptive statistics based on seven levels of language proficiency: Distinguished, Superior, Advanced, Intermediate, Developing, Novice, and Limited. The findings revealed that none of the participants reached the "Distinguished" level, while 21.05% were categorized as "Superior", 12.28% as "Advanced", and 22.81% as "Intermediate". Meanwhile, 24.56% of participants were categorized as having low proficiency levels (Developing-Limited), and 19.30% did not receive a score due to test incompleteness. These results indicate significant disparities in Indonesian language proficiency among civil servants. The study suggests that systematic and sustainable language development programs based on UKBI results are needed to strengthen linguistic competence as part of civil service professionalism. The implications of this study also highlight the importance of implementing national language policies in government institutions as mandated by Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning the Use of Indonesian.

Abstrak. Kemampuan berbahasa Indonesia merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung profesionalisme kerja, terutama dalam komunikasi resmi, pelayanan publik, dan penyusunan dokumen kedinasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemahiran berbahasa Indonesia aparatur melalui hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan subjek 57 peserta UKBI dari lingkungan lembaga pemerintah yang bergerak pada bidang peningkatan mutu pendidikan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berdasarkan klasifikasi tujuh peringkat UKBI, yaitu Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peserta yang mencapai peringkat Istimewa, sementara 21,05% peserta berada pada peringkat Sangat Unggul, 12,28% pada peringkat Unggul, dan 22,81% pada peringkat Madya. Namun demikian, 24,56% peserta masih berada pada kategori rendah, yaitu Semenjana hingga Terbatas, dan 19,30% peserta tidak memperoleh skor karena tidak menyelesaikan tes. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi kebahasaan di kalangan aparatur, yang berdampak pada mutu komunikasi resmi dan tata naskah dinas. Hasil penelitian merekomendasikan perlunya program pembinaan bahasa nasional berbasis UKBI yang terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dan kebijakan pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Keywords: Indonesian language proficiency, UKBI, civil servants, language competence, professionalism

Kata kunci: Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, kompetensi ASN, bahasa Indonesia baku, profesionalisme berbahasa, literasi kebahasaan

(*) Corresponding Author: niapiliang258@gmail.com

How to Cite: Kurniawaty, R., Harjanti, R., (2025). Kemampuan Bahasa Indonesia Aparatur Sipil Negara dalam konteks profesionalisme berbahasa: analisis hasil UKBI, 22 (2), 87-95. <https://doi.org/10.54124/jlmp.v22i2.175>

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai bahasa negara, bahasa persatuan, dan instrumen komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik. Kedudukan

tersebut telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 36, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Dalam konteks birokrasi modern, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari kompetensi profesional aparatur negara. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai kaidah menjadi indikator kompetensi administratif, integritas layanan publik, dan citra kelembagaan (Halim, 2019). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas kebahasaan ASN berkorelasi langsung dengan kualitas tata naskah dinas dan mutu pelayanan publik (Hidayat, 2024 & Wulandari, 2024).

Sejalan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan, kemampuan berbahasa Indonesia semakin dituntut untuk mendukung efektivitas komunikasi kelembagaan, penyusunan regulasi, notula rapat, naskah dinas, dan laporan kegiatan. Dalam konteks ini, kemampuan bahasa Indonesia bukan hanya kemampuan linguistik, tetapi kemampuan berpikir terstruktur melalui bahasa (Moeliono, 2018). Kalimat yang efektif, pilihan diksi yang tepat, dan penerapan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang konsisten mencerminkan tata kelola kelembagaan yang rapi dan bertanggung jawab (Mahyuni, 2023). Karena itu, penguasaan bahasa baku menjadi bagian dari kompetensi dasar ASN yang wajib dikembangkan secara terus menerus (Arifin, 2023).

Dalam berbagai laporan penelitian, ditemukan bahwa sebagian ASN masih mengalami kesulitan dalam penggunaan ragam bahasa resmi, terutama dalam penulisan berita acara, laporan kegiatan, surat dinas, dan dokumen lain yang menuntut kelogisan paragraf, struktur Subjek, Predikat, Objek, dan Keterangan (SPOK) yang tepat, serta sistematika penulisan formal (Purwaningsih, 2020 & Mahyuni, 2023). Lemahnya keterampilan menulis formal tersebut dapat berdampak pada rendahnya kejelasan instruksi organisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas (Widyatmoko, 2021 & Wulandari, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai instrumen standar nasional untuk mengukur kemahiran bahasa Indonesia penutur dewasa, termasuk ASN (Badan Bahasa, 2022). UKBI memberikan gambaran objektif mengenai kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, serta kompetensi kaidah kebahasaan. Sejumlah penelitian menyatakan, bahwa UKBI adaptif efektif sebagai alat pemetaan kemampuan kebahasaan dalam birokrasi modern (Santoso, 2024 & Kurniawan, 2024).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Indonesia ASN di berbagai instansi masih belum merata. Sebagian ASN masih mengalami kendala dalam penulisan naskah dinas, penggunaan struktur kalimat efektif, dan konsistensi kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) dalam dokumen formal (Purwaningsih, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi kebahasaan ASN masih menjadi tantangan nasional dan membutuhkan intervensi pembinaan yang sistematis. Beberapa studi menemukan bahwa kesadaran ASN untuk mengikuti asesmen kebahasaan masih rendah, dan implementasi Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia belum berjalan optimal di berbagai satuan kerja pemerintah (Dewi, 2023 & Rahmawati, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan bahasa dan praktik bahasa di lapangan, yang berdampak pada mutu dokumen administrasi dan komunikasi resmi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemahiran berbahasa Indonesia ASN di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil UKBI. Penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan distribusi kemampuan kebahasaan berdasarkan peringkat UKBI, mengidentifikasi aspek bahasa yang menjadi kekuatan dan kelemahan utama ASN, serta memberikan rekomendasi pengembangan kompetensi bahasa yang relevan dengan kebutuhan profesional ASN.

Penelitian ini penting dilakukan karena kemampuan berbahasa merupakan salah satu kompetensi dasar yang menentukan efektivitas layanan publik, kualitas dokumentasi kedinasan, serta kredibilitas lembaga pemerintah. Dengan memanfaatkan UKBI sebagai instrumen pemetaan, instansi dapat merancang program pembinaan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Kompetensi berbahasa, merupakan kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan bahasa sesuai kaidah, konteks sosial, serta tujuan komunikasi. Menurut teori Canale dan Swain, kompetensi berbahasa terdiri dari empat komponen utama yaitu kompetensi gramatikal, kompetensi sosiolinguistik, kompetensi wacana, dan kompetensi strategis. Dalam konteks ASN, empat komponen

ini sangat penting, karena setiap tugas kedinasan menuntut kejelasan struktur bahasa, ketepatan penggunaan ragam resmi, koherensi paragraf, serta strategi komunikasi yang sesuai dengan etika birokrasi (Halim, 2019 & Moeliono, 2018).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa kompetensi berbahasa tidak hanya mempengaruhi efektivitas komunikasi individual, tetapi juga berpengaruh pada kualitas tata kelola administrasi lembaga (Rahmawati, 2023 & Hidayat, 2024). ASN dituntut untuk mampu menghasilkan dokumen yang jelas, ringkas, dan sesuai prinsip bahasa baku; kegagalan dalam menerapkan struktur SPOK atau kelogisan kalimat dapat menghambat efektivitas layanan publik dan kolaborasi antar unit.

Ragam bahasa baku, merupakan bentuk bahasa yang dianggap paling tepat digunakan dalam konteks formal, termasuk administrasi pemerintahan. Bahasa baku berfungsi sebagai standar untuk memastikan keseragaman, kejelasan, dan ketertiban dalam dokumen kedinasan. Aspek-aspek penting dalam bahasa baku mencakup tata bahasa yang konsisten, ejaan sesuai kaidah EBI, pilihan diksi resmi, kelogisan kalimat, dan penyusunan paragraf yang efektif (Moeliono, 2018).

Studi kebahasaan mutakhir menemukan bahwa kesalahan dalam penerapan bahasa baku banyak terjadi pada dokumen pemerintahan, terutama pada struktur kalimat, imbuhan, dan penggunaan istilah yang tidak tepat (Mahyuni, 2023 & Wulandari, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan sistematis bagi ASN, untuk memastikan bahwa seluruh dokumen kedinasan memenuhi standar formal yang ditetapkan oleh negara.

Penelitian Rahmawati (2023) menegaskan bahwa ragam bahasa resmi pada instansi pemerintah harus digunakan secara konsisten, bukan hanya karena tuntutan legalitas tetapi juga karena bahasa baku mencerminkan wibawa institusi. Ketidaktepatan berbahasa dapat menurunkan kredibilitas lembaga, terutama ketika dokumen publik menjadi konsumsi masyarakat.

UKBI merupakan instrumen standar nasional yang digunakan untuk menilai kemampuan berbahasa Indonesia bagi penutur dewasa. UKBI menilai lima aspek kemampuan berbahasa: mendengarkan, membaca, kaidah kebahasaan, menulis, dan berbicara. Setiap peserta kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh peringkat kemahiran bahasa, mulai dari Istimewa (I) hingga Terbatas (VII) (Badan Bahasa, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa UKBI adaptif memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mengelompokkan peserta berdasarkan kompetensi nyata dalam penggunaan bahasa, terutama bila digunakan untuk memetakan kemampuan kelompok profesional seperti guru dan ASN (Santoso, 2024 & Kurniawan, 2024). UKBI terbukti efektif menjadi alat diagnostik yang mampu menunjukkan kelemahan pada aspek tertentu, misalnya kemampuan menulis formal atau pemahaman kaidah kebahasaan.

Studi Arifin (2023) menunjukkan bahwa UKBI dapat dijadikan dasar untuk merancang pelatihan kebahasaan bertahap bagi pegawai pemerintah. Demikian pula Dewi (2023) menekankan bahwa implementasi UKBI sebagai asesmen wajib sangat relevan untuk mendukung kebijakan Perpres 63/2019 mengenai penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pemerintahan.

Transformasi digital menuntut ASN untuk mampu menyesuaikan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi digital seperti surat elektronik, sistem manajemen dokumen, maupun aplikasi layanan publik. Meskipun teknologi mempermudah proses administrasi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa era digital juga memunculkan gaya bahasa yang lebih ringkas dan informal, yang berpotensi memengaruhi kepatuhan ASN terhadap bahasa baku dalam dokumen resmi (Salsabila, 2023 & Hidayat, 2024).

Selain itu, analisis wacana dokumen publik pemerintah menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan frasa tidak baku dan kesalahan konsistensi gaya bahasa di berbagai instansi, terutama yang telah mengadopsi sistem digital (Yusuf, 2022). Oleh karena itu, pembinaan kebahasaan ASN harus mempertimbangkan kemampuan adaptasi ASN terhadap tuntutan bahasa formal di tengah ekosistem digital yang semakin cepat dan informal.

Kebijakan bahasa di Indonesia ditegaskan melalui UUD 1945 Pasal 36 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Dalam konteks kedinasan, landasan utama penggunaan bahasa Indonesia baku diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019.

Penelitian kebijakan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih belum konsisten di berbagai instansi pemerintah (Dewi, 2023 & Rahmawati, 2023).

Pengutamaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi tidak hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi berjalan efisien, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Widyatmoko, 2021 & Hidayat, 2024). Dengan demikian, pembinaan bahasa Indonesia bagi ASN merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan tujuan memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kemahiran berbahasa Indonesia ASN berdasarkan hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena efektif dalam memaparkan fenomena kebahasaan tanpa manipulasi variabel, serta memungkinkan peneliti menyajikan temuan berbasis persentase dan distribusi kategori kemampuan (Sugiyono, 2019).

Pendekatan ini juga sejalan dengan metode penelitian kebahasaan yang digunakan dalam studi kompetensi ASN modern, terutama dalam memetakan kemampuan bahasa sebagai dasar rekomendasi kebijakan pelatihan (Arifin, 2023 & Mahyuni, 2023).

Subjek penelitian berjumlah 57 ASN di lingkungan BPMP Provinsi DKI Jakarta. Seluruh peserta mengikuti UKBI pada tahun 2025, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kemampuan kebahasaan terbaru yang relevan dengan tuntutan profesionalisme kerja ASN di era digital sebagaimana digambarkan dalam penelitian terbaru (Salsabila, 2023 & Hidayat, 2024).

Kriteria inklusi, ASN aktif pada tahun pelaksanaan UKBI dan mengikuti UKBI minimal sampai tahap penentuan skor. Kriteria eksklusi, peserta yang tidak menyelesaikan tes (dikelompokkan sebagai "tidak dinilai"). Permasalahan seperti ketidaksediaan mengikuti asesmen atau ketidaksesuaian jadwal menjadi fenomena yang lazim ditemukan dalam program peningkatan kompetensi ASN, sebagaimana dicatat Dewi (2023), sehingga kelompok "tidak dinilai" tetap dimasukkan dalam analisis deskriptif.

Data penelitian ini merupakan data primer berbentuk nilai UKBI yang terdiri dari skor total kemahiran, skor aspek per tes (mendengarkan, membaca, menulis, berbicara, kaidah kebahasaan) dan peringkat kemampuan bahasa berdasarkan klasifikasi Badan Bahasa (Badan Bahasa, 2022). Data ini merupakan sumber yang valid karena UKBI memiliki standar pengukuran yang telah diuji secara nasional (Santoso, 2024 & Kurniawan, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengambil langsung hasil UKBI resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian literasi kebahasaan ASN karena bersifat objektif dan tidak terpengaruh bias subjektivitas penilaian (Mahyuni, 2023 & Wulandari, 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif meliputi penghitungan persentase peserta dalam setiap peringkat UKBI, pemetaan tiga kelompok kompetensi yaitu kompeten tinggi, kompeten menengah dan kompeten rendah serta analisis aspek kemampuan yang merujuk lima komponen UKBI

Untuk memberikan kejelasan dalam menginterpretasikan data penelitian, tingkat kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) diklasifikasikan ke dalam tujuh peringkat resmi yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Peringkat Istimewa (I) menggambarkan kemampuan berbahasa yang sangat tinggi, ditandai dengan kapasitas memahami dan menghasilkan teks sangat kompleks secara presisi mendekati penutur ahli. Peringkat Sangat Unggul (II) menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa baku secara akurat dalam berbagai konteks resmi dan akademik, sedangkan peringkat Unggul (III) menandakan penguasaan struktur dan kaidah bahasa dengan baik serta kesalahan yang minimal. Peringkat Madya (IV) mencerminkan kemampuan berbahasa yang cukup baik dalam konteks formal, meskipun masih terlihat ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Di bawahnya, peringkat Semenjana (V) menunjukkan bahwa peserta memiliki penguasaan bahasa dasar yang memadai namun masih mengalami kesulitan dalam struktur kalimat dan pemilihan diksi baku. Peringkat Marginal (VI) menggambarkan adanya kesulitan signifikan dalam penggunaan tata bahasa, ejaan, dan penyusunan

paragraf. Adapun peringkat Terbatas (VII) menunjukkan kemampuan berbahasa formal yang sangat rendah, dengan tingkat kesalahan linguistik yang tinggi. Berdasarkan rentang peringkat tersebut, kompetensi peserta dapat dikelompokkan ke dalam kategori kompetensi tinggi, menengah, dan rendah sesuai proporsi kemampuan yang ditunjukkan.

Berdasarkan pengelompokan tingkat kemahiran berbahasa, kompetensi peserta UKBI dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kompeten tinggi, kompeten menengah, dan kompeten rendah. Kelompok Kompeten Tinggi, yang mencakup peringkat UKBI II hingga III, menggambarkan peserta yang mampu memahami dan menghasilkan bahasa baku dengan baik serta hanya menunjukkan kesalahan minor dalam penerapannya. Kelompok kompeten menengah, yang berada pada peringkat IV, menunjukkan bahwa peserta telah mampu menggunakan bahasa formal secara cukup memadai, namun masih terdapat ketidakkonsistenan dalam struktur bahasa, diksi, maupun penerapan kaidah kebahasaan. Sementara itu, kelompok kompeten rendah, yang mencakup peringkat V hingga VII, menunjukkan adanya keterbatasan signifikan dalam penyusunan struktur kalimat, penerapan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), pemilihan diksi baku, serta penalaran paragraf. Ketiga kategori ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai variasi kemampuan kebahasaan peserta dan menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembinaan lanjutan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus persentase: $P=f / N \times 100\%$ dimana P adalah persentase peringkat kemampuan, f adalah frekuensi subjek per kategori dan N adalah jumlah total peserta penelitian.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel distribusi, diagram naratif, dan interpretasi akademik agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kompetensi kebahasaan ASN yang menjadi subjek penelitian.

Penggunaan analisis deskriptif ini sesuai dengan praktik penelitian evaluatif dalam kebahasaan ASN, terutama untuk menentukan area kelemahan yang membutuhkan intervensi pelatihan (Arifin, 2023 & Dewi, 2023). Selain itu, pendekatan ini efektif dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang pola kompetensi yang bervariasi antarpeserta, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Yusuf (2022) dan Hidayat (2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemahiran berbahasa Indonesia aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPMP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Data diperoleh dari 57 peserta UKBI dan dianalisis berdasarkan kategori peringkat kemahiran bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Data menunjukkan bahwa tidak ada peserta yang mencapai peringkat tertinggi yaitu Istimewa (I). Distribusi kemampuan cenderung bervariasi dan menunjukkan adanya ketimpangan kemahiran berbahasa di lingkungan ASN. Distribusi Tingkat Kemahiran Bahasa hasil UKBI terlihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Distribusi hasil UKBI peserta penelitian

Peringkat UKBI	Predikat	Jumlah	Persentase
I	Istimewa	0	0%
II	Sangat Unggul	12	21,05%
III	Unggul	7	12,28%
IV	Madya	13	22,81%
V	Semenjana	5	8,77%
VI	Marginal	6	10,53%
VII	Terbatas	3	5,26%
-	Tidak mengikuti/tidak tercatat	11	19,30%
Total		57	100%

Analisis rata-rata kemampuan skor UKBI peserta berada dalam kategori Madya (IV) dengan kecenderungan variasi kemampuan yang cukup tinggi. Kelompok kemampuan tertinggi (peringkat II-III) mencapai 33,33%, menunjukkan adanya potensi kebahasaan yang baik di lingkungan BPMP. Namun demikian, kategori rendah (peringkat V-VII) mencapai 24,56%, yang menunjukkan perlunya intervensi pembinaan bahasa secara sistematis.

Temuan awal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2024), yang menyatakan bahwa kompetensi kebahasaan ASN umumnya berkisar pada kategori menengah, dengan kesulitan terbesar pada kemampuan bahasa tulis formal. Kondisi ini diperkuat oleh studi Mahyuni (2023), yang menemukan bahwa kesalahan berbahasa dalam dokumen resmi masih sering terjadi pada sebagian besar instansi.

Untuk mempermudah interpretasi hasil, peserta dikelompokkan ke dalam tiga kategori kompetensi seperti terlihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pemetaan Kelompok Kompetensi Bahasa

Kelompok	Peringkat	Persentase	Keterangan
Kompeten Tinggi	II-III	33,33%	Perlu pembinaan lanjutan (advanced)
Kompeten Menengah	IV	22,81%	Perlu penguatan teknis kebahasaan
Kompeten Rendah	V-VII	24,56%	Perlu pendampingan intensif
Tidak dinilai	-	19,30%	Perlu penjadwalan ulang UKBI

Kelompok Kompeten Tinggi (peringkat II-III), dengan presentase 33,33%, peserta dalam kelompok ini umumnya cukup mampu memahami teks kompleks, menangkap informasi tersirat, dan menggunakan kalimat efektif. Namun demikian, sebagian besar masih menunjukkan kelemahan dalam penerapan kaidah kebahasaan, khususnya terkait tanda baca dan konsistensi imbuhan, sebagaimana juga dicatat oleh Arifin (2023).

Kelompok kompeten menengah (peringkat IV), dengan persentase 22,81%, menggambarkan kompetensi cukup stabil, tetapi belum konsisten dalam penggunaan ragam formal. Penelitian Dewi (2023), menemukan pola serupa bahwa ASN pada level kemampuan menengah sering tidak konsisten dalam memilih diksi baku dan menyusun paragraf efektif.

Sedangkan kelompok kompeten rendah (peringkat V-VII), dengan persentase 24,56% ini memiliki kesulitan dalam menyusun kalimat dengan struktur SPOK yang benar, penggunaan afiksasi baku, dan menerapkan kelogisan paragraf. Kesulitan ini biasanya muncul akibat rendahnya paparan terhadap penulisan formal (Purwaningsih, 2020 & Mahyuni, 2023). Kelompok rendah ini menjadi prioritas pembinaan, karena penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat berdampak langsung pada akurasi dokumen dinas dan pemahaman instruksi kelembagaan (Hidayat, 2024).

Hasil interpretasi terhadap kemampuan berbahasa peserta berdasarkan aspek-aspek yang diukur dalam UKBI menunjukkan pola yang cukup konsisten. Pada aspek mendengarkan, peserta umumnya memiliki kemampuan yang relatif baik dalam memahami informasi lisan. Aspek membaca juga menunjukkan hasil yang positif, dengan kemampuan memahami teks tertulis berada pada kategori baik. Namun demikian, kemampuan menulis masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyusunan kalimat efektif, koherensi paragraf, dan ketepatan diksi. Temuan yang paling menonjol terlihat pada aspek kaidah kebahasaan, yang menunjukkan kelemahan signifikan, khususnya terkait kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia (EYD), penggunaan imbuhan, serta konsistensi pilihan kata. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek produktif, khususnya menulis dan kaidah kebahasaan, merupakan area yang membutuhkan intervensi pembinaan lebih intensif.

Kemampuan memahami teks bacaan relatif baik, namun masih ada peserta yang kesulitan menangkap relasi antargagasan dalam paragraf panjang. Kecenderungan ini sejalan dengan temuan Yusuf (2022) yang menemukan bahwa ASN sering memahami makna tekstual, tetapi belum kuat dalam memahami struktur wacana secara komprehensif.

Temuan mengindikasikan bahwa, kelemahan utama peserta terletak pada kemampuan berbahasa tulis formal, yang diperlukan dalam pembuatan dokumen kedinasan seperti laporan, surat dinas, dan naskah formal lainnya. Aspek menulis merupakan titik terlemah peserta. Banyak ditemukan kesalahan tanda baca, struktur kalimat tidak efektif, penggunaan kata tidak baku dan paragraf tidak koheren.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Mahyuni (2023) dan Wulandari (2024), yang menyatakan bahwa kesalahan penulisan adalah masalah paling signifikan di lingkungan birokrasi. Kurniawan (2024) juga menunjukkan bahwa pelatihan menulis formal masih jarang dilakukan secara berjenjang sehingga kemampuan ASN tidak berkembang optimal.

Kaidah kebahasaan merupakan aspek dengan nilai rendah pada mayoritas peserta. Kesalahan umum meliputi pemilihan imbuhan yang salah, bentuk kata tidak baku, ejaan tidak konsisten, dan salah

penggunaan kata depan. Penelitian Rahmawati (2023), menggarisbawahi bahwa ketidakkonsistenan penerapan kaidah kebahasaan dapat memengaruhi kualitas citra institusi karena dokumen resmi menjadi tidak profesional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kemahiran berbahasa Indonesia aparat sipil negara (ASN) di lingkungan BPMP Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori beragam, dengan distribusi kemampuan yang tidak merata. Sebanyak 33,33% peserta berada pada kategori kompetensi tinggi (Sangat Unggul dan Unggul), sementara 24,56% peserta berada pada kategori rendah (Semenjana hingga Terbatas). Kondisi ini mencerminkan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia di lingkungan birokrasi pendidikan masih memerlukan penguatan yang serius untuk mendukung profesionalisme berbahasa dalam tugas kedinasan. Kondisi ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi kebahasaan ASN cenderung heterogen (Wulandari, 2024 & Mahyuni, 2023).

Temuan tersebut juga sejalan dengan pendapat Purwaningsih (2020), yang menyatakan bahwa persoalan utama kebahasaan ASN di Indonesia bukan terletak pada kemampuan komunikatif, melainkan pada kemampuan berbahasa baku dalam konteks formal kelembagaan. Hal ini terlihat pada hasil UKBI, yang menunjukkan bahwa aspek kaidah kebahasaan dan keterampilan menulis formal menjadi kelemahan utama peserta, sementara kemampuan memahami teks lisan dan bacaan relatif lebih baik. Fakta ini menegaskan bahwa, kompetensi bahasa tulis formal masih belum menjadi perhatian utama dalam budaya administrasi pemerintahan (Cahyani, 2019).

Dalam konteks profesionalisme ASN, bahasa bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga instrumen manajemen administratif yang mencerminkan wibawa kelembagaan (Moeliono, 2018). Ketidakmampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam dokumen resmi dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik, efektivitas penyusunan kebijakan, serta kredibilitas institusi pemerintah. Hal serupa dikemukakan oleh Widyatmoko (2021) yang menegaskan bahwa mutu bahasa administrasi pemerintah merupakan indikator kompetensi birokrasi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, belum ada peserta yang mencapai peringkat Istimewa (I) berdasarkan klasifikasi UKBI. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun sebagian ASN memiliki kemampuan berbahasa yang baik, kemampuan literasi akademik dan kedalaman berbahasa formal masih rendah. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian Suryaman (2019), yang menemukan bahwa kemampuan menulis ilmiah pegawai pemerintah di Indonesia masih berada pada kategori rendah karena minimnya pembinaan bahasa.

Temuan penting lainnya, adalah masih adanya 19,30% peserta yang tidak memperoleh nilai UKBI akibat tidak mengikuti atau tidak menyelesaikan tes. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengukuran kemampuan bahasa melalui UKBI masih rendah. Padahal, berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 33, lembaga pemerintah wajib mengutamakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi dan administrasi negara.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa, UKBI relevan sebagai instrumen pemetaan mutu kebahasaan ASN, diperlukan program pembinaan bahasa berkelanjutan berbasis hasil UKBI, kemahiran berbahasa Indonesia harus diposisikan sebagai kompetensi dasar ASN, bukan sebagai keterampilan tambahan, dan pengutamaan bahasa negara dalam birokrasi perlu diimplementasikan lebih serius di UPT Kemendikdasmen di daerah seperti di BPMP.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini konsisten dengan laporan-laporan sebelumnya bahwa kemampuan berbahasa ASN cenderung lebih kuat dalam aspek reseptif (mendengarkan dan membaca) dibanding aspek produktif (menulis dan berbicara) (Cahyani, 2019). Penelitian ini juga mendukung studi terbaru, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kompetensi kebahasaan dengan tuntutan administrasi modern (Arifin, 2023 & Dewi, 2023).

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan pernyataan Salsabila (2023), bahwa era digital telah memengaruhi budaya berbahasa ASN. Pesan singkat, gaya bahasa media sosial, dan penyederhanaan struktur kalimat dalam aplikasi digital sering terbawa ke dalam dokumen resmi, sehingga menurunkan kepatuhan terhadap bahasa baku.

Berdasarkan temuan data dan kajian teori, beberapa tantangan kebahasaan yang dihadapi ASN dapat dirumuskan, yaitu pertama, minimnya pelatihan bahasa resmi karena sebagian besar ASN

tidak pernah mengikuti pelatihan penulisan naskah formal sejak awal karier, seperti yang ditemukan Wulandari (2024). Kedua, dampak digitalisasi yaitu komunikasi digital yang cepat dan tidak formal, berkontribusi terhadap menurunnya sensitivitas terhadap ragam bahasa baku (Salsabila, 2023). Ketiga, rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan bahasa, dengan penelitian Dewi (2023), menunjukkan bahwa banyak instansi belum menginternalisasi Perpres 63/2019 secara optimal. Dan keempat, yaitu ketidakterbiasaan menulis formal dimana Mahyuni (2023), menemukan bahwa unit kerja pemerintahan cenderung lebih banyak mengandalkan template sehingga ASN tidak terlatih menyusun teks baru secara mandiri.

Implikasi temuan penelitian ini terhadap profesionalisme ASN merupakan implikasi langsung antara lain terhadap kualitas layanan birokrasi, yaitu dokumen kedinasan berpotensi kurang akurat bila kompetensi menulis ASN rendah, instruksi organisasi dapat disalahartikan akibat bahasa tidak jelas atau ambigu (Hidayat, 2024). Kemudian kredibilitas publik terhadap institusi menurun, jika dokumen resmi mengandung kesalahan bahasa (Rahmawati, 2023), dan evaluasi kinerja organisasi terganggu karena laporan tidak memenuhi standar akademik maupun teknis (Yusuf, 2022).

Hasil penelitian mengenai tingkat kemahiran berbahasa Indonesia ASN melalui UKBI, memberikan sejumlah implikasi penting bagi pengembangan profesionalisme ASN, peningkatan mutu dokumen kedinasan, serta implementasi kebijakan bahasa nasional. Implikasi ini dikelompokkan menjadi tiga kategori besar, yaitu implikasi teoretis, implikasi praktis, dan implikasi kebijakan publik.

Implikasi Teoretis. Temuan penelitian menguatkan teori kompetensi berbahasa, yang menyatakan bahwa penguasaan bahasa bukan hanya terkait kemampuan linguistik, tetapi juga kemampuan berpikir terstruktur, penyusunan argumen, dan komunikasi logis dalam konteks formal (Halim, 2019 & Moeliono, 2018). Data menunjukkan bahwa, kemampuan menulis dan kaidah kebahasaan merupakan aspek dengan skor terendah pada ASN. Implikasi ini mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemampuan produktif dalam bahasa—terutama menulis—memerlukan pembinaan yang lebih intensif dibandingkan kemampuan reseptif (Mahyuni, 2023 & Wulandari, 2024).

Selain itu, temuan ini mendukung penelitian Santoso (2024) dan Kurniawan (2024), yang menunjukkan bahwa UKBI adaptif mampu mengukur kompetensi bahasa secara lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan model pelatihan kebahasaan berbasis data. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi teoretis bahwa UKBI bukan sekadar instrumen evaluasi, tetapi juga instrumen diagnostik dalam pengembangan kompetensi bahasa ASN.

Implikasi Praktis. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kebutuhan praktis yang harus segera ditindaklanjuti oleh instansi dalam hal ini BPMP DKI Jakarta, untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan administrasi yaitu pertama, perlunya pelatihan berjenjang berbasis UKBI berdasarkan temuan bahwa lebih dari 24% ASN berada pada kategori kemampuan rendah, menunjukkan pentingnya pelatihan bahasa berjenjang. Pelatihan harus dimulai dari dasar (kaidah kebahasaan), menengah (penyusunan kalimat efektif), hingga tingkat lanjutan (penulisan laporan formal). Hal ini sesuai dengan saran Arifin (2023), yang menekankan pelatihan terstruktur berdasarkan hasil asesmen bahasa. Kemudian, penguatan keterampilan menulis formal, karena menulis merupakan aspek dengan nilai terendah, maka instansi perlu menyediakan modul pelatihan khusus penulisan naskah kedinasan. Studi Wulandari (2024), menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan menulis ASN berhubungan langsung dengan peningkatan mutu laporan dan dokumen strategis organisasi. Selanjutnya, dibentuk klinik bahasa di lingkungan instansi, Mahyuni (2023) menekankan pentingnya “klinik bahasa” internal, yang berfungsi sebagai pusat konsultasi kebahasaan, pemeriksaan naskah dinas, dan pendampingan revisi dokumen. Klinik bahasa dapat menjadi solusi, untuk mengurangi kesalahan linguistik dalam dokumen resmi. Berikutnya evaluasi ulang budaya berbahasa di era digital, perubahan gaya komunikasi akibat digitalisasi menyebabkan ASN cenderung menggunakan bahasa singkat dan tidak baku dalam aktivitas kedinasan (Salsabila, 2023). Instansi harus menetapkan pedoman bahasa digital, untuk menyelaraskan penggunaan bahasa formal dalam ruang kerja virtual, sistem informasi, dan korespondensi elektronik. Selain itu juga pemanfaatan UKBI sebagai indikator kompetensi. Hasil penelitian membuktikan bahwa UKBI relevan digunakan untuk mengukur kesiapan kebahasaan ASN dalam pelayanan publik. Kurniawan (2024) menyarankan agar instansi menjadikan skor UKBI sebagai indikator penilaian kompetensi ASN, terutama pada jabatan yang terkait penulisan dan komunikasi.

Implikasi Kebijakan Publik. Penelitian ini juga memberikan beberapa implikasi penting untuk perumusan dan implementasi kebijakan bahasa di lingkungan pemerintahan: 1) Penguatan Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2019, hasil penelitian selaras dengan temuan Dewi (2023) dan Rahmawati (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi Perpres masih belum optimal. Banyak instansi belum konsisten menggunakan ragam bahasa baku dalam dokumen dan layanan publik. Oleh karena itu, instansi perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan bahasa resmi dalam dokumen serta menyosialisasikannya secara menyeluruh, 2) Integrasi Asesmen UKBI dalam Sistem Pengembangan ASN, UKBI seharusnya menjadi bagian dari sistem pengembangan karier ASN, terutama untuk jabatan yang memerlukan kemampuan menulis, seperti analis kebijakan, perencana, widyaprada, dan pranata humas. Santoso (2024) menegaskan bahwa UKBI adaptif dapat berfungsi sebagai alat pemetaan kompetensi dan rekomendasi pelatihan, 3) Kebijakan Audit Bahasa pada Dokumen Kedinasan, instansi perlu menetapkan kebijakan audit bahasa berkala terhadap dokumen publik dan laporan kedinasan. Audit bahasa dapat mendeteksi kesalahan berulang dan memberikan umpan balik sistematis bagi pejabat penanggung jawab dokumen. Kebijakan seperti ini telah direkomendasikan oleh Rahmawati (2023) sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintah, 4) Penguatan Budaya Bahasa Resmi di Lembaga Pemerintah, kualitas dokumen resmi merupakan cerminan profesionalisme sebuah lembaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih diperlukan budaya kerja yang menempatkan bahasa baku sebagai bagian dari disiplin administrasi. Hidayat (2024) menunjukkan bahwa budaya berbahasa yang baik berkontribusi pada meningkatnya kepuasan publik terhadap layanan pemerintah, dan 5) Penyesuaian Sistem Informasi Pemerintah dengan Kaidah Bahasa, Salsabila (2023) mencatat bahwa banyak aplikasi pemerintah belum mengadopsi desain antarmuka yang mendorong penggunaan bahasa baku. Oleh karena itu, sistem teknologi pemerintahan perlu disesuaikan agar lebih ramah terhadap kaidah bahasa resmi, misalnya dengan fitur pemeriksa ejaan otomatis.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia ASN di BPMP Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan, dengan mayoritas berada pada tingkat menengah dan tidak ada yang mencapai kategori istimewa. Kelemahan utama terletak pada aspek menulis dan kaidah kebahasaan, seperti penggunaan tanda baca, diksi baku, struktur kalimat, dan kelogisan paragraf. Digitalisasi juga mempengaruhi gaya bahasa ASN yang cenderung informal dan tidak baku. Untuk meningkatkan kompetensi, perlu dilakukan integrasi UKBI sebagai asesmen berkala, pelatihan bahasa berjenjang, pembentukan klinik bahasa, penguatan budaya bahasa resmi, audit bahasa kedinasan, serta penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kemampuan menulis ASN.

PUSTAKA ACUAN

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Panduan pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Cahyani, I. (2019). Kompetensi bahasa Indonesia dalam birokrasi publik: Analisis kemampuan kebahasaan ASN. *Jurnal Pembinaan Bahasa Indonesia*, 7(2), 85-94. <https://doi.org/10.26499/jpbi.v7i2.1726>
- Dewi, L. (2023). Evaluasi implementasi Perpres 63/2019 dalam birokrasi daerah. *Jurnal Bahasa dan Administrasi Negara*, 11(2), 88-101.
- Halim, A. (2019). Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam komunikasi resmi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Pendidikan*, 8(1), 45-52.
- Hidayat, R. (2024). Literasi bahasa tulis dan kualitas layanan publik. *Jurnal Administrasi Modern*, 10(1), 55-70.
- Kurniawan, D. (2024). Efektivitas UKBI adaptif terhadap peningkatan kompetensi pegawai pemerintah. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 14(1).
- Mahyuni, P. (2023). Kesalahan berbahasa dalam dokumen dinas pemerintah. *Jurnal Linguistik Terapan Indonesia*, 9(3), 200-214.
- Moeliono, A. M. (2018). *Bahasa Indonesia dalam perencanaan bahasa*. Pusat Bahasa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Purwaningsih, S. (2020). Analisis kesalahan berbahasa dalam surat dinas ASN. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 56-65.
- Rahmawati, S. (2023). Ragam bahasa resmi pada instansi pemerintah. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 7(2), 90-110.
- Santoso, B. (2024). UKBI adaptif sebagai instrumen pemetaan mutu bahasa nasional. *Jurnal Kebijakan Bahasa*, 5(1).
- Salsabila, T. (2023). Tantangan ASN di era digital terhadap penggunaan bahasa baku. *Jurnal Literasi Digital Indonesia*, 2(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryaman, M. (2019). Literasi kebahasaan dalam lingkungan kerja ASN. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 19(2), 150-159.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Widyatmoko, B. (2021). Mutu bahasa dalam administrasi pemerintahan: Perspektif kebijakan bahasa nasional. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(3), 211-222.
- Wulandari, M. (2024). Keterampilan menulis akademik ASN: Studi multikasus. *Jurnal Penelitian Bahasa*, 16(1).
- Yusuf, A. (2022). Analisis wacana dokumen publik instansi pemerintah. *Jurnal Analisis Bahasa Indonesia*, 8(4).